

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi sehingga mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya (Halim,2007). Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal (Halim,2007).

Jusmawati (2011) menyatakan bahwa pertimbangan mendasar terselenggaranya otonomi daerah adalah perkembangan dari dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian. Keterbukaan dan kemandirian yang dimaksud adalah mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan anggaran daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Pasal 4 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan

memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Menurut Halim (2007), pemerintah daerah yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis rasio keuangan terhadap APBD antara lain: rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio kemampuan keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pusat ataupun dari pinjaman. Dan rasio kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan daerah dalam rangka meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan. Rasio kemampuan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan antar komponen PAD terhadap total pendapatan daerah (Halim,2007).

Berdasarkan analisis rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terlihat potensi yang diperoleh dari kinerja keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena kinerja keuangan pemerintah yang baik akan memicu pemerintah untuk menggali potensi-potensi daerah dan akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah, pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Sularso,2011).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat karena pertumbuhan mengindikasikan bahwa suatu daerah tersebut dapat dikatakan maju dan berkembang (Kawa,2011). Pertumbuhan ekonomi dilihat dari kinerja keuangan daerah yaitu berupa rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio kemampuan keuangan daerah, dan untuk mengukur kinerja keuangan tersebut dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah. Jadi untuk melihat pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dibutuhkan data Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah. Data Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Dan Total Pendapatan Daerah Kabupaten Solok
Tahun 2002-2015

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah
2002	6.444.500	227.909.930
2003	11.039.500	243.769.410
2004	14.675.000	258.412.860
2005	9.371.900	211.819.470
2006	12.256.540	362.892.980
2007	14.291.220	424.507.259
2008	18.086.000	465.981.000
2009	20.300.000	465.387.000
2010	20.636.775	491.083.000
2011	29.143.922	622.712.000
2012	24.652.021	726.489.764
2013	33.418.134	855.085.274
2014	42.668.956	981.547.156
2015	47.980.248	1.108.663.633

Sumber: BPS Dan DJPK RI (Data Diolah)

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa PAD kabupaten Solok mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2005 mengalami penurunan, pada tahun 2005 PAD Kabupaten Solok sebesar Rp.9.371.900 (jutaan rupiah) dibandingkan pada tahun sebelumnya, PAD pada tahun 2004 sebesar Rp.14.675.000 (jutaan rupiah). Dan dilihat dari segi pendapatan Kabuapten Solok, pendapatan daerah juga mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun juga mengalami penurunan pada tahun 2005, pendapatan daerah pada tahun 2005 sebesar Rp.211.819.470 (jutaan rupiah) dibandingkan pada tahun 2004 sebesar Rp.258.412.860 (jutaan rupiah). PAD dan pendapatan daerah merupakan indikator keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah, semua pendapatan daerah yang didapatkan pemerintah daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pemabangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok. Dilihat dari data BPS Kabupaten Solok bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabuapten Solok mencapai 5,77%. Laju pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Solok berfluktuasi setiap tahunnya. Dimana pertumbuhan ekonomi terbesar terdapat pada tahun 2008 yaitu sebesar 6,35% dan terendah terdapat pada tahun 2002 yaitu sebesar 4,34%.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, untuk melihat keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kinerja keuangan daerah dapat diukur dari beberapa rasio keuangan daerah dan untuk mengukur kinerja keuangan daerah digunakan data PAD dan total pendapatan Daerah. Setelah mengukur kinerja keuangan daerah dapat dilihat bagaimana pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Solok. Oleh karena itu, untuk melihat apakah pemerintah Kabupaten Solok sudah mampu mengelola keuangan daerahnya dengan baik dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Solok**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Solok tahun anggaran 2002 – 2015?
2. Bagaimana kinerja keuangan daerah Kabupaten Solok tahun anggaran 2002 – 2015?

3. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok tahun anggaran 2002 – 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Solok tahun anggaran 2002 – 2015.
2. Menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Solok tahun anggaran 2002 – 2015.
3. Menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok tahun anggaran 2002 – 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintahan daerah di dalam membuat kebijakan dan menentukan arah dan strategi di dalam perbaikan pengelolaan keuangan pemerintahan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dimasa yang akan datang.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh penerapan teori Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Kemampuan Keuangan Daerah untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Solok.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dapat dilakukan secara terarah dan lebih terfokus atas masalah yang diteliti, maka diperlukan ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian mempunyai rentang waktu dari tahun 2002-2015 dengan menggunakan data sekunder Kabupaten Solok sebagai daerah penelitian yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Solok, dan lain sebagainya.
2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi dalam bentuk persen), yang mana tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan berdasarkan PDRB harga konstan, sedangkan variabel bebas yang diteliti adalah rasio kemandirian keuangan daerah (yang dinyatakan dalam persen) dan rasio kemampuan keuangan daerah (yang dinyatakan dalam persen).

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari : Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Gambaran Umum Daerah Penelitian, Bab V Temuan empiris dan Implikasi Kebijakan, Bab VI Penutup.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang penelitian, dari latar belakang yang telah diuraikan maka diperoleh rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah maka akan diperoleh tujuan dan manfaat dari penelitian. Pada akhir bab ini akan diuraikan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori dan penelitian terdahulu yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian. Dari landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut maka di dapat kerangka pemikiran konseptual. Diakhir bab ini terdapat hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang variabel-variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, ruang lingkup penelitian dan pengolahan data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan kondisi umum daerah dan kemudian menjelaskan perkembangan rasio kemandirian daerah, dan rasio kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Solok.

BAB V : TEMUAN EMPIRIS DAN IMPIKASI KEBIJAKAN

Dalam bab ini memuat hasil dan pembahasan dari analisa data yang telah diteliti serta merumuskan kebijakan apa yang perlu dan bisa diambil dalam penelitian ini.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan singkat dari penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi saran untuk berbagai pihak.

